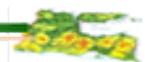


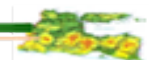
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

**MISI 4 : MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAYANAN PUBLIK**

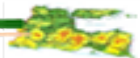
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
1.	Meningkatnya pemanfaatan TIK dan layanan informasi publik	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif	Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan terkini	Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik	Persen		96	293. Program Informasi Publik 294. Program Komunikasi Publik 295. Program Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
								296. Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi 297. Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi 298. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama 299. Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan		



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
2.	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengamanan informasi	Meningkatkan kualitas pengamanan informasi secara tepat dan akurat	Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengamanan informasi	Persentase informasi persandian yang diamankan	persen		30	300. Program Aplikasi Informatika	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Meningkatkan kualitas data dan informasi	Peningkatan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu	Persen		60	301. Program Pengelolaan Data dan Statistik	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif	Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip	Persen		100	302. Program Penyelamatan, Pendayagunaan dan Pelayanan Arsip 303. Program Pengembangan Penyelenggaraan Kearsipan 304. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Peningkatan koordinasi integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persentase jumlah program di RKPd yang sesuai dengan RPJMD	Persen		100	305. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase usulan musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	Persen		34	306. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 307. Program Perencanaan Pembangunan		



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								308. Prasarana Wilayah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 309. Program Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah 310. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Geospasial 311. Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan		
								312. Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 313. Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan 314. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan		Biro Administrasi Pembangunan
				Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Hasil Penelitian yang	Persen	20	35	315. Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan 316. Program Penelitian Ekonomi, Sumber	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Penelitian dan Pengembangan



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
				dimanfaatkan				317. Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan		
				Persentase OPD Provinsi dan Kab/kota yang memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	Persen	2	13	318. Program Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah		
6.	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur	Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik secara konsisten	1. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp (dalam Juta)	11.579.340,71	13.709.614,39	319. Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 320. Program Pengelolaan Pajak Daerah 321. Program Pengelolaan Retribusi Daerah Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan 322. Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah 323. Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah 324. Program	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pendapatan Daerah



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			3. Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai opini BPK		WTP	WTP	325. Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak serta Retribusi Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			4. Peningkatan efesiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik					326. Program Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Jawa Timur 327. Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah 328. Program Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 329. Program Pengelolaan Aset Daerah 330. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan		



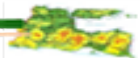
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								331. Keuangan Daerah Program Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah 332. Program Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota		
				Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur	Persen		75	333. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 334. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 335. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 336. Program Pencegahan Korupsi 337. Program Peningkatan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Inspektorat



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja		
				Nilai SAKIP	Nilai	B	AA	338. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 339. Program Penataan Ketelaksanaan dan Pelayanan Publik	Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Organisasi
				Predikat hasil evaluasi LPPD	Nilai	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	340. Program Penataan Penyempurnaan Kelembagaan Demokrasi serta Otonomi Daerah 341. Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 342. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
				Persentase Pelayanan Keprotokolan	Persen	91	100	343. Program Pelayanan Badan Penghubung Daerah 344. Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur
				Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusulaan dan kepentingan umum	Persen		85	345. Program Pembentukan Produk Hukum Provinsi 346. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota 347. Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Hukum
				Persentase penduduk ber KTP				348. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependuduk-an dan Catatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
				Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen		95	349. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan 350. Program Koordinasi,	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								351. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Ekonomi 352. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan 353. Program pengembangan Data Informasi		



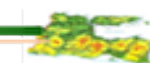
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								354. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro
								355. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi		
								356. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan		
								357. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan		



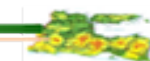
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 358. Program pengembangan Data Informasin		
								359. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan 360. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi 361. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								362. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 363. Program pengembangan Data Informasi		
								364. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan 365. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi 366. Program Koordinasi, Fasilitasi dan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan



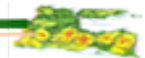
NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan 367. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 368. Program pengembangan Data Informasi		
								369. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan 370. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim V Jember



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi 371. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Kemasyarakatan 372. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana 373. Program pengembangan Data Informasi		
								374. Program Pelayanan Administrasi Umum, Pengelolaan Surat, Telekomunikasi dan Arsip	Penunjang Urusan Pemerintahan	Biro Umum



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
								375. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 376. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 377. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah 378. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Seluruh OPD di Provinsi Jawa Timur
				Persentase penduduk ber KTP	Persen	84,27	95,00	379. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kependuduk-an	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
7.	Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah	Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	Indeks	73,00	90	380. Program Perencanaan, Pengolahan sistem informasi data dan pengadaan ASN 381. Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) 382. Program Penataan dan Pelayanan Pegawai ASN 383. Program Penyelenggaraan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			yang lebih jelas tolok ukurnya					Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja, Pendayagunaan serta Kesejahteraan Aparatur		
				Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi	Persen	75,30	99	384. Program Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Korpri		
				Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	Persen	86,14	95	385. Program Pengembangan Kompetensi Manajerial SDM Aparatur 386. Program Pengembangan Kompetensi Teknis SDM Aparatur 387. Program Pengembangan Kompetensi Fungsional SDM Aparatur 388. Program Penilaian Kompetensi SDM Aparatur 389. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Sertifikasi Kompetensi	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Pendidikan dan Pelatihan





NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
8.	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)	1. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsiv, transparan dan akuntabel. 2. Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana 3. Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam 4. Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang	Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	Persen		100	390. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana 391. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana 392. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 393. Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
						2013	2019			
			dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana							
9.	Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks		78,5	394. Program Layanan Persidangan 395. Program Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD

